

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PARIWISATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. Pariwisata

##### 1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologis pariwisata berawal dari bahasa sansakerta yaitu "pari" yang berarti banyak atau berkali-kali dan kata "wisata" yang berarti perjalanan, atau berpergian.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dengan berulang-ulang atau berkali-kali baik dalam hal waktu yang sama di lokasi yang sama atau waktu yang sama di lokasi yang berbeda, namun pengertian pariwisata memiliki inti perjalanan yang dilakukan berulang-ulang atau perjalanan yang dilakukan ke berbagai tempat berbeda.<sup>6</sup>

Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan transportasi darat, laut, udara yang dilakukan oleh seseorang baik individu maupun kelompok dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang terbatas serta dengan maksud tertentu, yang merupakan suatu pergerakan alamiah yang terjadi di dalam kehidupan manusia dengan memenuhi keinginan batin yang bermacam-macam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm 11

<sup>6</sup> Soeswoyo, D. M., Dewi, L., & Asaparini, P. S. (2018). Promosi Melalui Media Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Peranannya dalam Pariwisata Kota. *Jurnal Pariwisata*

<sup>7</sup> Richard Sihite, *Hotel Management Pengelolaan Hotel, SIC*, Surabaya, 2000, Hlm. 7

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu yang dimulai dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud tidak untuk berkerja ataupun mencari nafkah di tempat yang sedang dikunjungi, tetapi hanya untuk sekedar menikmati perjalanan tersebut guna untuk berliburan serta memenuhi keinginan lain.<sup>8</sup>

Beberapa ahli dalam bidang kepariwisataan mendeskripsikan tentang pariwisata yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman, karena arti pariwisata akan selalu berkembang dan dapat berubah seiring dengan berjalanya waktu, Pariwisata adalah perpindahan sementara yang di lakukan manusia dengan tujuan keluar dari kediamannya.<sup>9</sup>

Pengertian pariwisata secara yuridis dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 1 yang mengandung ketentuan meliputi delapan hal yaitu:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 118

<sup>9</sup> Marpaung Happy, *Pengetahuan Kepariwisataaan*, ALFABETA, Bandung, 2000, Hlm. 13

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata

## 2. Bentuk-bentuk Pariwisata

Pariwisata dapat dipelajari tidak hanya dari segi motivasi dan tujuan perjalanannya saja tetapi juga bisa dilihat dari kriteria lain misalnya bentuk-bentuk perjalanan wisata yang dilakukan, lamanya perjalanan serta pengaruh-pengaruh ekonomi akibat adanya perjalanan wisata tersebut.

### a. Pariwisata Individu dan Kolektif

Baik pariwisata dalam negeri maupun luar negeri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Individual Tourism*, atau pariwisata perorangan.
2. *Organized Collective Tourism*, atau pariwisata kolektif yang diorganisasi secara baik.

Kategori pertama meliputi seseorang atau kelompok orang (teman atau keluarga) yang mengadakan perjalanan wisata maupun pembuatan programnya sehingga bebas pula dalam mengadakan perubahan-perubahan setiap waktu dikehendaki. Seseorang maupun kelompok orang tersebut melakukan sendiri semua persiapan dalam rangka mendapatkan perlengkapan serta jasa-jasa yang diperlukan.

Kategori kedua meliputi sebuah biro perjalanan (*travel agent* atau *tour operator*) yang menjual suatu perjalanan menurut program dan jadwal waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk keseluruhan anggota kelompok yang dimaksudkan diatas. Biro perjalanan tersebut menawarkan kepada siapa saja yang berminat dengan keharusan

membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan untuk keperluan seluruh perjalanan tersebut. Peserta *organized tour* ini dibebaskan dari segala macam pengurusan karena baik perlengkapan maupun jasa-jasa lain yang diperlukan telah disediakan oleh penyelenggara perjalanan.

b. Pariwisata Jangka Panjang, Pariwisata Jangka Pendek dan Pariwisata Ekskursi

Pembagian menurut lamanya perjalanan dibedakan atas pariwisata jangka panjang dimaksudkan sebagai suatu perjalanan yang berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan bagi wisatawan sendiri karena ini memiliki arti penting bagi tempat-tempat yang dikunjungi, terlebih apabila terjadi pada jenis *recreation atau cultural tourism*. Selama ini sudah ada *pleasure tourism* sebagai akibat dari meningkatnya mobilitas wisatawan modern sekarang, terutama yang mempergunakan kendaraan sendiri. Akan tetapi *pleasure trip* dalam kategori jangka waktu manapun pada umumnya mencakup kunjungan ke berbagai daerah yang terdiri atas kunjungan serta singgah hanya dalam waktu pendek di setiap tempat atau destinasi wisata yang akan dikunjungi.

Pariwisata jangka pendek atau *short term tourism* mencakup perjalanan yang berlangsung beberapa hari secara sosiologis hal tersebut adalah bentuk perjalanan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tidak dapat mengambil liburan panjang.

Pariwisata ekskursi atau *excursionist tourism* adalah suatu perjalanan wisata yang tidak lebih dari 24 jam dan tidak menggunakan fasilitas akomodasi.

c. Pariwisata Dengan Alat Transportasi

Ada berbagai bentuk pariwisata dengan alat angkutan yang dipakai misalnya kereta api, kapal laut, kapal terbang, bus, dan lain lain. Sedangkan wisatawan yang berjalan kaki atau *pedestarian tourism* sampai seakrang masih banyak ditemukan. Bentuk ini tentu harus diperhatikan untuk kebijaksanaan investasi.

d. Pariwisata Aktif dan Pasif

Untuk mempelajari pariwisata internasional dan pengaruhnya terhadap neraca pembayaran kedatangan wisatawan asing yang membawa devisa untuk suatu negara merupakan bentuk pariwisata yang sering disebut *active tourism*. Sedangkan penduduk suatu negara yang pergi keluar negeri dan membawa uang keluar negeri dan yang mempunyai pengaruh negatif terhadap neraca pembayaran merupakan *passive tourism*.<sup>10</sup>

### 3. Jenis-jenis Pariwisata

Berbagai pembahasan tentang kepariwisataan tidak lepas dari jenis-jenis pariwisata dan macam-macam objek wisata adalah:

---

<sup>10</sup> Jaelani, A. K. (2018). Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata*,

1. Wisata Budaya Seseorang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, budayawan seni mereka. Sering perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya.
2. Wisata Kesehatan Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi di sumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.
3. Wisata Olah Raga Ini dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau negara, seperti Asia Games, Olimpiade, Thomas Cup, Uber Cup dan lain-lain.
4. Wisata Komersial Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Tidak jarang pameran atau pekan raya ini

diramaikan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian.

5. Wisata Industri Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang kesuatu komplek satu daerah perindustrian dimana pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar, dengan tujuan dan maksud untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
6. Wisata Politik Wisata politik adalah perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam pariwisata kegiatan politik, misalnya ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, Penobatan Ratu Inggris di London, dan sebagainya.
7. Wisata Konvensi Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya.
8. Wisata Sosial Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan misalnya buruh, petani, atau mahasiswa.



9. Wisata Pertanian Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk studi atau sekedar melihat-lihat sekelilingnya sambil menikmati segarnya tanaman beranekaragam dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur mayur dan palawija disekitar perkebunan yang di kunjungi.
10. Wisata Maritim atau Bahari Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, seperti di danau, pantai, atau memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan yang indah dari permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan.
11. Wisata Cagar Alam Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan wisata dengan jalan mengatur wisata ketempat cagar alam atau hutan lindung.
12. Wisata Buru Jenis wisata ini banyak dilakukan dinegeri yang memiliki daerah atau tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah yang digalakan oleh agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan.

13. Wisata Pilgrim Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adatistiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat yang dilakukan baik perorangan maupun rombongan yang berkunjung ketempat suci, kemakam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, kebukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata Pilgrim ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman danti dakjarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Ditanah air kita banyak tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat- umat beragama tertentu ,misalnya seperti Candi Borobudur, Prambanan, Pura Besakih di Bali, Sendangsono di Jawa Tengah, makam Wali Songo, dan sebagainya.

14. Wisata Bulan Madu Wisata bulan madu adalah perjalanan yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru yang diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan dengan fasilitas yang istimewa atau khusus yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti kamar pengantin dihotel yang khusus disediakan dengan peralatan yang serba istimewa.

15. Wisata Petualangan Wisata petualangan adalah jenis wisata yang melakukan kegiatan wisata seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajah, mendaki tebing yang terjal, terjun kedalam sungai yang curam, arung jeram menyusuri goa dan susur pantai.<sup>11</sup>

Jenis pariwisata dibagi menjadi 5 kategori yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan dan alat angkut yang akan digunakan.<sup>12</sup>

- a. Menurut asalnya, wisatawan terdiri dari dua yaitu Wisatawan Domestik dan Wisatawan Internasional, Wisatawan Domestik adalah wisatawan yang berpindah tempat sementara namun berada dalam wilayah negerinya sendiri, sedangkan Wisatawan Internasional adalah wisatawan yang datang dari luar negeri.
- b. Menurut efeknya terhadap neraca pembayaran menjadi dua akibat, yaitu Wisatawan Aktif dan Wisatawan Pasif, Wisatawan Aktif adalah wisatawan yang berasal dari luar negeri ke suatu destinasi wisata, sedangkan Wisatawan Pasif adalah wisatawan yang keluar dari negeri tempat dia berasal sehingga wisatawan tersebut memberikan dampak terhadap neraca pembayaran.

---

<sup>11</sup> Pendit, S, Nyoman, 2003, *Ilmu Pengetahuan Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 38

<sup>12</sup> Nyoman S Pendit. 2002, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta, Pradnya Paramita Hlm. 14

- c. Menurut jangka waktu terbagi menjadi dua yaitu wisatawan jangka pendek dan wisatawan jangka panjang, waktu yang dapat ditentukan untuk mengukur berapa lama wisatawan tersebut tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan tergantung kepada kebijakan masing-masing negara.
- d. Menurut jumlah wisatawan terbagi atas wisatawan tunggal dan wisatawan rombongan, Wisatawan Tunggal adalah wisatawan yang datang sendiri menuju ke destinasi wisata atau tempat wisata, sedangkan Wisatawan Rombongan adalah wisatawan yang datang menuju tempat atau destinasi wisata secara bersama-sama atau berkelompok.
- e. Menurut alat angkut yang dapat dipergunakan oleh wisatawan maka kategori tersebut dapat dibagi menjadi wisatawan laut, kereta api, serta mobil.

Pendekatan pemasaran wisata pada masa lalu adalah niat untuk memastikan calon pengunjung bahwa aset suatu tujuan wisata yang tersedia adalah apa yang diinginkan oleh calon pengunjung dengan adanya perubahan cara penawaran wisata dari masa lampau ke masa sekarang sebagai efek baiknya juga muncul beragam jenis wisata dan pariwisata sebagai akibat dari kreatifitas masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata. Sesuai keinginan dari calon pengunjung muncul beberapa jenis pariwisata seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata arkeologi, wisata bahari bahkan

dikemudian hari muncul beberapa jenis wisata baru seperti agrowisata, wana wisata, hingga wisata industri.<sup>13</sup>

#### **4. Tujuan Pariwisata**

Tujuan Pariwisata sendiri adalah seluruh dari keinginan masyarakat tentang pariwisata, dalam tujuan kepariwisataan sendiri terdapat beberapa aspek diantaranya adalah ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan, untuk mewujudkan tujuan kepariwisataan dibutuhkan pula peran serta masyarakat untuk mewujudkannya.

Dalam Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 4 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa tujuan dari pariwisata adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Menghapus kemiskinan.
- d. Mengatasi pengangguran.
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.
- f. Memajukan kebudayaan.
- g. Mengangkat citra bangsa.
- h. Memupuk rasa cinta tanah air.
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa

---

<sup>13</sup> Juwita, I., & Hariyanto, O. I. (2016). Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan. *Jurnal Pariwisata*

## 5. Manfaat Pariwisata

Dalam kehidupan bermasyarakat seiring dengan berkembangnya jaman maka sektor pariwisata pun juga mengalami peningkatan karena semakin kreatifnya masyarakat dalam berkarya dalam bidang pariwisata dan menciptakan inovasi baru, dalam kepariwisataan muncul hal positif yang diakibatkan oleh pariwisata yang semakin maju, dampaknya dapat mencakup beberapa segi yaitu.<sup>14</sup>

### 1. Segi Ekonomi.

Bahwa perkembangan pariwisata berakibat tumbuhnya usaha-usaha ekonomi yang saling menunjang dalam istilah teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperkembangkan dasar-dasar perekonomian negara.

### 2. Segi Seni dan Budaya.

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah memenuhi rasa keingintahuan, mengagumi atau menyelami seni budaya ke daerah yang ingin mereka kunjungi.

### 3. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup.

Pengembangan pariwisata diharuskan agar selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga segala kekayaan dan keindahan alam dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sebaiknya sebagai daya tarik wisatawan.

---

<sup>14</sup> Direktorat Jendral Pariwisata, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Jakarta, Hlm. 29

4. Menambah Nilai Pergaulan Hidup dan Pengetahuan.

Interaksi yang terjalin antara wisatawan dengan penduduk yang dikunjungi dapat memberikan nilai-nilai baru dalam arti menambah cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai kehidupan lainm ditambah dapat pula penyerapan pengetahuan baru bagi penduduk sekitar.

5. Menambah Kesempatan Kerja.

Industri pariwisata umumnya meruakan industri yang menyerap kebutuhan tenaga kerja karena tidak hanya dengan mementingkan mesin, sebagai industri yang melayani maka disamping membutuhkan unsur cepat, mudah, nikmat juga ramah apabila keseluruhan rangkaian tenaga kerja tersebut ditambah dengan industri penunjang pariwisata seperti kerajinan, souvenir dan lain sebagainya, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan jauh lebih banyak lagi.

6. Menunjang Perbaikan Kesehatan dan Prestasi Kerja.

Manusia selalu ingin melepaskan kejenuhan, kesibukan aktifitas hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan selalu menginginkan suasana baru dan lingkungan baru baik hanya untuk sementara waktu.

Selain itu sebagai dampak positif atas meningkatnya pariwisata adalah terjaminya aspek budaya dan tata cara kehidupan bermasyarakat, karena kebudayaan dari masyarakat kawasan wisata

menjadi tujuan dari para wisatawan dan akan terus berjalan kepada anak cucu mereka.<sup>15</sup>

## **6. Pengembangan Pariwisata**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2013 dalam Pasal 2 ayat (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:

- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata.
- f. Mengumumkan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- g. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
- h. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional efektif serta efisien.

Pengembangan penataan ini sangat terbuka karena Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional menetapkan kebijakan pengembangan pariwisata berdasarkan pendekatan sistem, utuh, terpadu, multi disiplin, partisipatoris,

---

<sup>15</sup> Aziz, Y., Komaladewi, R., Indika, D. R., Shiratina, A., & Perisha, B. (2018). Potensi Pasar Melalui Penilaian Karakteristik Wisatawan Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*



dengan kriteria ekonomis, teknis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.

Pariwisata sebagai salah satu faktor pembangunan dapat dilihat secara terpisah, pembangunan di dalamnya juga berkaitan dengan sektor lain karena Indonesia telah meletakkan sebagai salah satu faktor penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang berkelanjutan tetapi pada kenyataannya konsep pariwisata di Indonesia masih mengalami banyak kendala baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, kendala tersebut terletak pada berbagai macam masalah substansial seperti arti pariwisata berkelanjutan itu sendiri, pengembangan produk, pasar serta pemasaran dan dampaknya bagi lapisan masyarakat, permasalahan itu sudah jelas yaitu karena belum adanya kebijakan pariwisata yang jelas dan terpadu.<sup>16</sup>

Kebijakan pariwisata nasional dapat ditinjau dari Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Kedudukan Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 dalam perundang undangan nasional merupakan Undang Undang non organik yang lahir dan timbul atas pemenuhan kebutuhan kebijakan operasional di bidang pariwisata yang bersifat lintas sektoral.<sup>17</sup>

Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di samping menyiratkan penyelenggaraan pariwisata yang

---

<sup>16</sup> Ghani, Y. A. (2017). Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. *Jurnal Pariwisata*

<sup>17</sup> Robby Ardiwijaya, 2007, *Menilik Kebijakan Pembangunan Pariwisata*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, Jakarta, Hlm. 2

memperhatikan kelestarian lingkungan, keseimbangan, keterpaduan ekologi dan keberlanjutan, juga telah menempatkan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan, Prosesnya tampak memberikan arah keberlanjutan yang jelas dalam pariwisata seperti menempatkan pariwisata berlandaskan pada budaya tradisonal, sebagai wahana persahabatan antar bangsa, serta mendorong ekonomi kerakyatan.

Faktor utama pengembangan pariwisata dalam suatu daerah tujuan wisata naik lokal, regional maupun ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitanya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Dengan lain kata pengembangan pariwisata pada suatu daerah yang memiliki tujuan pariwisata selalu dipertimbangkan dengan keuntungan serta manfaat bagi masyarakat.

Faktor kedua mengapa pengembangan pariwisata lebih banyak bersifat non ekonomis. Salah satu dari motivasi wisatawan berkunjung pada daerah destinasi wisata adalah untuk melihat keindahan alam termasuk cagar alam, kebun raya, maupun tempat bersejarah seperti bangunan kuno atau candi dan lain-lain keseluruhan tempat tersebut memerlukan biaya yang besar untuk pemeliharaan dan perawatan, dengan majunya pariwisata sebagai industri biaya yang besar untuk renovasi, pemeliharaan dan pengembangan obyek wisata akan diperoleh dari hasil kegiatan pariwisata.

## **B. Partisipasi Masyarakat**

### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya.<sup>18</sup>

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.<sup>19</sup> Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan

---

<sup>18</sup> Adisasmita, Raharjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta, Graha Ilmi, Hlm. 4

<sup>19</sup> Isbandi, Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Konstanitas dan Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok FISIP UI Press, Hlm 27

setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.<sup>20</sup>

Pengukuran partisipasi masyarakat dilihat dari derajat wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan digolongkan menjadi tingkatan non partisipasi, tokenisme dan *citizen power* oleh Arnstein. Berikut adalah penjelasan dari tangga partisipasi menurut Arnstein.<sup>21</sup>

**Tabel 1**  
**Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Tangga Partisipasi Arnstein.**

<b>Tangga Partisipasi</b>	<b>Hakekat Kesertaan</b>	<b>Tingkatan Pembagian Kekuasaan</b>
Manipulasi ( <i>Manipulation</i> )	Permainan Oleh Pemerintah	Tidak Ada Partisipasi
Terapi ( <i>Therapy</i> )	Sekedar agar masyarakat tidak marah/mengobati	Tidak Ada Partisipasi
Pemberitahuan ( <i>Informing</i> )	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	sekedar justifikasi agar mengiyakan
Konsultasi	Masyarakat didengar, tapi	sekedar justifikasi

<sup>20</sup> Mubyarto, 1997, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta, Aditya Media, Hlm 35

<sup>21</sup> Wicaksono AM. 2010. Analisis Tingkat Partisipasi Warga dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy Plant Pondok Ungu). [Skripsi]. Bogor [ID] : Institut Pertanian Bogor

<i>(Consultation)</i>	tidak selalu dipakai sarannya	agar mengiyakan
Penentraman <i>(Placation)</i>	Saran masyarakat diterima  tetapi tidak selalu  dilaksanakan	sekedar justifikasi  agar mengiyakan
Kemitraan <i>(Partnership)</i>	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
Pendelegasian Kekuasaan <i>(Delegated Power)</i>	Masyarakat diberi kekuasaan  (sebagian atau seluruh  program)	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
Kontrol Masyarakat <i>(Citizen Control)</i>	Sepenuhnya dikuasai oleh  masyarakat	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi, wilayah, tempat manusia dan makhluk lainya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> International NGO Forum on Indonesia Development, "Petunjuk Tekhnis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan", [www.infid.org](http://www.infid.org)., diakses pada hari Kamis, 8 September 2018, jam 18:30 WIB.

Partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama, partisipasi merupakan kesediaan seseorang dalam melancarkan suatu program sesuai kemampuan dan kenginannya tanpa mengesampingkan yang lain agar program dapat berhasil. Keterlibatan seseorang akan sangat mempengaruhi keberhasilan program, dengan adanya partisipasi ini seseorang dapat mengemukakan suara baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan atau bahkan dalam evaluasi/ hasil program itu sendiri. Partisipasi bisa terjadi antara sesama anggota masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah. Partisipasi merupakan suatu tanda permulaan dari adanya pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan mampu mengembangkan menjadi masyarakat yang mandiri.<sup>23</sup>

Partisipasi menekankan kepada masyarakat yang memiliki peran pembuatan keputusan. Rakyat yang awalnya tidak pernah terlibat dalam suatu pengembangan, kini menjadi prioritas dalam pengendalian terhadap sumber daya dan institusi sehingga semua aspirasi, ide ataupun tenaga dapat berkontribusi aktif dalam pengembangan sebagai bentuk partisipasi. Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mengakibatkan kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat menambah kesejahteraan rakyat. Partisipasi sering kali disangkut pautkan dengan pemberdayaan masyarakat demi kelangsungan hidup masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis.

---

<sup>23</sup> Ndraha, Talizidhuhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 102

Secara umum dalam program pemerintah, partisipasi merupakan cara untuk mengajak masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian, serta sebagai upaya untuk menjamin peningkatan peran masyarakat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.<sup>24</sup>

Partisipasi warga adalah mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.

Keikutsertaan atau keterlibatan disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu partisipasi lebih tepat diartikan sebagai "keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat diluar pekerjaan atau profesinya sendiri".

Partisipasi masyarakat, mengutamakan pada partisipasi langsung masyarakat dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan kesimpulan pada lembaga dan proses pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan proaktif dan reaktif atas pembangunan dan penerapan program, dengan melakukan sebuah kesepakatan, tindakan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Jim Ife & Frank Tesoriero, 2008, *Community Development*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hlm. 296-297

<sup>25</sup> Dwiningrum, S.I.A, 2015, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 56

Pasal 1 ayat 41 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak, seperti hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang sama serta adil. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam konteks penataan ruang maka peran serta masyarakat dapat di definisikan sebagai proses keterlibatan masyarakat yang memungkinkan mereka dapat mempengaruhi proses sebagaimana disebutkan dalam Undang undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1 yaitu: pengaturan penataan ruang (ayat 9), pembinaan penataan ruang (ayat

---

<sup>26</sup> Raharjana, D. T. (2012). Membangun pariwisata bersama rakyat: Kajian partisipasi lokal dalam membangun Desa wisata di dieng plateau. *Jurnal Kawistara*



10), pelaksanaan penataan ruang (ayat 11), dan pengawasan penataan ruang (ayat 12).<sup>27</sup>

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Tumbuh dan kembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat oleh pemerintah, karena masyarakat merupakan obyek dari adanya pembangunan. Dari lain pihak partisipasi masyarakat juga ditentukan oleh adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat akan berkembang apabila terdapat kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.<sup>28</sup>

Program pengembangan masyarakat harus mendorong pengakuan dan peningkatan hak maupun kewajiban untuk berpartisipasi.

Kondisi yang mendorong partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting.
- b. Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan.
- c. Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai.

---

<sup>27</sup> Sjofar Bakar, "Definisi Partisipasi", <http://www.buletinonline.com>, diakses pada hari Minggu tanggal 9 September 2018, jam 12:30 WIB.

<sup>28</sup> Theresia, Aprilia, et al. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. Hlm 208

- d. Orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam partisipasinya.
- e. Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan masyarakat yang tidak bisa berpikir cepat, kurang percaya diri dan lain-lain.<sup>29</sup>

Sedangkan masyarakat tergerak untuk ikut berpartisipasi jika:

- a. Jika partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang atau berperan dalam pengambilan keputusan.<sup>30</sup>

Dalam partisipasi juga terdapat faktor yang menghambat partisipasi masyarakat ada beberapa kendala atau hambatan yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan.

---

<sup>29</sup> Jim Ife & Frank Tesoriero, 2008, *Community Development*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hlm.309-314

<sup>30</sup> Ndraha, Talizidhuhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 105.

Ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atas keinginan mereka sendiri.<sup>31</sup>

Selain itu juga terdapat faktor internal dan eksternal sebagai penghambat dari partisipasi masyarakat. Faktor internal berasal dari individu dalam kelompok masyarakat itu sendiri seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari *stakeholder* yang mempunyai pengaruh penting dalam kesuksesan program seperti pemerintah daerah, RT/RW ataupun yang lainnya.<sup>32</sup>

Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci kesejahteraan sosial keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material maupun finansial diharapkan agar menambahkan rasa, kebersamaan dan rasa mempunyai proses dan hasil pembangunan dikomunitas tersebut. Jadi ada kaitan yang erat antara pemberdayaan dan partisipasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat suatu program tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Adanya partisipasi masyarakat maka masyarakat merasa dilibatkan

---

<sup>31</sup> Soetomo, 2008, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 214

<sup>32</sup> Devianti, Dea. (2010). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. eJournal Administrasi Negara. Vol (2) Hlm. 384

dalam sebuah program dimana program tersebut akan mewujudkan suatu perubahan kearah yang lebih baik.<sup>33</sup>

### **3. Manfaat Partisipasi**

Masyarakat setempat pada sebuah destinasi wisata harus terlibat dalam pengembangannya dan mendapat manfaat dari pengembangan tersebut. pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat yang meliputi 5 dimensi pengembangan yang merupakan aspek utama pembangunan kepariwisataan sebagai berikut:

1. Dimensi Ekonomi: dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, berkembangnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.
2. Dimensi Sosial: dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran gender yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, serta memperkuat organisasi komunitas.
3. Dimensi Budaya: dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati nilai budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, berkembangnya nilai budaya pembangunan yang melekat erat dalam kebudayaan setempat.

---

<sup>33</sup> Widiyanto, D., Handoyo, J. P., & Fajarwati, A. (2008). Pengembangan Pariwisata Perdesaan (Suatu Usulan Strategi bagi Desa Wisata Ketingan). *Bumi Lestari*

4. Dimensi Lingkungan: dengan indikator terjaganya daya dukung lingkungan, adanya sistem pengelolaan sampah yang baik, meningkatnya kepedulian akan perlunya konservasi dan preservasi lingkungan.

5. Dimensi Politik: dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, dan adanya jaminan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat penting untuk terus didorong untuk menyalurkan keuntungan dari kegiatan kepariwisataan yang berlangsung kepada masyarakat secara langsung.<sup>34</sup>

#### **4. Tujuan Partisipasi**

Dalam pembentukan perencanaan pembangunan khususnya mengenai masalah tata ruang kota yaitu para pelaku perekonomian di Kawasan Sosromenduran perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan warga setempat, hal ini dapat timbul setelah adanya sosialisasi yang masih dan sering diadakannya diskusi antara pemerintah dengan para pelaku pariwisata sehingga menentukan suatu titik temu yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Budaya melibatkan partisipasi masyarakat ini yang diharapkan selalu dilakukan sehingga

---

<sup>34</sup> Sunaryo, Bambang, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm. 142

nanti tidak ada satupun pihak yang dirugikan seiring dengan munculnya permasalahan yang ada. Dengan adanya hal ini dapat terjadi keseimbangan diantara pihak pemerintah sebagai penentu pembangunan dan masyarakat sebagai bagian yang berada dalam pembangunan tersebut.<sup>35</sup>

## 5. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*), implementasi, pemanfaatan (*benefit*) dan evaluasi program pembangunan. Keempat macam partisipasi tersebut merupakan suatu siklus yang dimulai dari *decision making* yang akan muncul, namun dapat pula dari *decision making* langsung menuju ke *benefits* atau pada evaluasi, begitu juga dengan umpan baliknya. Disamping keempat bentuk partisipasi tersebut, terdapat satu lagi yaitu masyarakat sebagai penerima program perlu di libatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan program pembangunan.<sup>36</sup>

Sementara dalam pembagiannya bentuk atau tahap partisipasi menjadi 5 yaitu:

---

<sup>35</sup> Nawawi, A. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*

<sup>36</sup> Joe Svira, "Definisi dan Bentuk Partisipasi", 3 Juni 2012, [Newjoesavirablog.blogspot.com](http://Newjoesavirablog.blogspot.com), diakses pada hari Kamis, 9 September 2018, jam 20:00 WIB

1. Partisipasi dalam kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam menyerap dan memberi masukan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam maksud menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
5. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>37</sup>

## **6. Tahapan Partisipasi**

1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal serta alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan

---

<sup>37</sup> Ndrah, Talizuduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta PT Renika Cipta, hlm. 103-104

kebutuhan masyarakat luas. Karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan melalui dibuat nya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan mengenai program pembangunan di wilayah setempat.<sup>38</sup>

## 2. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan

Untuk membedakan ada tingkatan partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan partisipasi dalam tahap pemanfaatan, partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi dilihat dari ukuran keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan masyarakat diminta turut membuat keputusan yang memuat rumusan tujuan maksud serta target. Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang terkini adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengendalikan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan perencana teknis yang berasal dari atas pada dasarnya sangat mendalam oleh karena situasi ini peranan masyarakat sendirilah yang memutuskan pilihan akhir sebab mereka lah yang pada akhirnya menanggung kehidupan mereka oleh karena itu sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan

---

<sup>38</sup> Mardikanto, 2001, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Bandung, PT Pesona Adi, hlm. 85



tindakan masyarakat bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu penting dalam meraih komitmen tetapi karena masyarakatlah yang jauh lebih mengerti kondisi setempat yang tidak dapat di atur oleh perencanaan teknik atasan.

### 3. Tahapan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang biasanya tidak mampu) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam pembangunan, dilain pihak lapisan diatasnya (yang pada umumnya lebih mampu) lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan tidak dituntut sumbanganya secara teratur, karena itu partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus dijabarkan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, serta beragam bentuk pengorbanan lainya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan.<sup>39</sup>

### 4. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program kerja dan proyek pembangunan sangat diperlukan tidak hanya agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan sebelumnya tetapi juga untuk mengetahui tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 86

dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.<sup>40</sup>

#### 5. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan, sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat luas sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan memikat kemauan dan kesukarelaan pada saat pembangunan yang akan dilakukan dimasa mendatang.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 87

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 87